

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 Ayat (4) menjelaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penjelasan mengenai asas sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu asas pada peradilan yang paling utama dan mendasar dari pelayanan baik berupa administrasi harus berpedoman pada asas efektif dan efisien.

Pengadilan tidak hanya harus independen serta memiliki integritas, akan tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan dengan adil kepada setiap lapisan masyarakat. Setiap pengadilan pada tingkat pertama memiliki rancangan dengan tujuan mampu memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat dengan ditandai proses biaya murah, sederhana dan jangka waktu penyelesaian secara cepat.¹

“Hukum Acara Perdata memiliki tujuan sebagai rambu dan prosedur dalam penanganan maupun penyelesaian sengketa perdata yang berasaskan cepat, sederhana dan biaya ringan.”² PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjelaskan bahwa gugatan sederhana biasa disebut dengan istilah *claim court* yaitu merupakan sebuah

¹ Nevey Varida Ariani, *Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim Lawsuit In Indonesia Justice System)*, Jurnal Penelitian Hukum, De Jure, ISSN 1410-5632 Vol, 18 No, 3, September: 381-396.

² Sri Wahyu Ningsih, Lukman Ilham & Irsyaad Dahri, *Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Makassar*, <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/6767>

mekanisme penyelesaian perkara dengan cepat serta ketentuan yang ditetapkan.

Gugatan sederhana (*small claim court*) merupakan gugatan dalam bidang hukum perdata dengan nilai materil gugatan paling banyak sekitar Rp 200.000.000 (dua ratus juta) yang diselesaikan dengan tata cara dalam pembuktian sederhana (*simple procedure and evidentiary*).³ Sistem gugatan sederhana (*small claim court*) adalah bagian daripada kewenangan peradilan umum terhadap sengketa perdata dengan nominal gugatan relatif kecil. Hal ini berarti gugatan sederhana hanya bisa dilakukan pada peradilan umum dan tidak dapat diajukan ke peradilan lainnya.⁴

Pasal 3 dan 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana memberikan batasan terhadap pengajuan gugatan sederhana, yaitu:

1. Sengketa cidera janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal 200 juta;
2. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
3. Bukan sengketa hak atas tanah;
4. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
5. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
6. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama.

³ M. Natsir Asnawi, 2016, *Hukum Acara Perdata; Teori, Praktik dan Permasalahannya Di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Jakarta: UII Press, hal. 648.

⁴ Waris Priyanto, 2015, *Pemeriksaan Gugatan Sederhana*, PN Lampung, Hal. 1-2.

Sistem peradilan sederhana walaupun secara normatif dan substansinya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersengketa juga memiliki kekurangan atau kendala dalam praktiknya. Pengadilan litigasi dianggap oleh beberapa pihak tidak efektif maupun efisien dikarenakan dapat memberikan dampak pada aktivitas bisnis para pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan bahwa proses beracara pada pengadilan melewati prosedur yang sudah memiliki standar dan tidak boleh dilewati. Proses ini bagi para pihak yang bersengketa memiliki resiko terhadap kerahasiaan jika perkara yang diajukan merupakan bagian daripada bisnis, selain itu tidak memberikan keuntungan bagi para pihak akan tetapi harus ada pihak yang menang maupun kalah.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap sistem peradilan pada Pengadilan Negeri Surakarta baik dari awal pengajuan gugatan hingga putusan hakim. Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul “Efektivitas Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Surakarta”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja kendala dalam pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Surakarta?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Surakarta dalam menerapkan efektivitas gugatan sederhana untuk para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Surakarta dalam menerapkan efektivitas gugatan sederhana untuk para pihak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan refrensi yang dapat menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa, khususnya mengenai efektivitas gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Manfaat praktis

memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang luas bagi pedagang serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak dalam memahami efektivitas gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Surakarta.

E. Kerangka Pikiran

Keterangan

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4) disebutkan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa “Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan

pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.

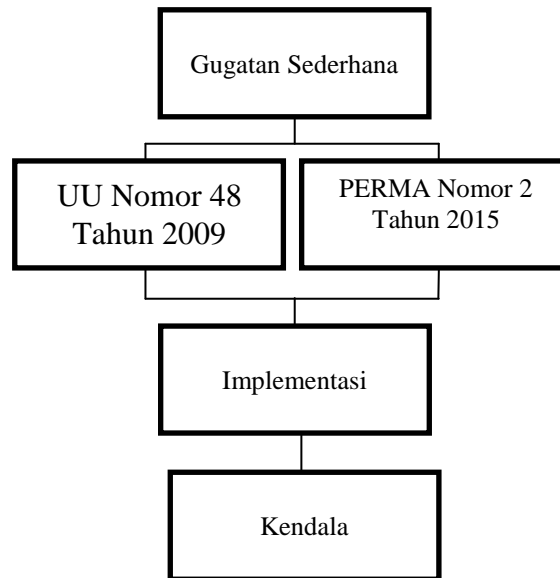
Implementasi pada asas sederhana memiliki makna administratif sebagai upaya untuk menjadikan sistem peradilan sebagai sebuah institusi yang memberikan jaminan hadir atau tercapainya keadilan dalam perspektif penegakkan hukum secara cepat bagi para pihak yang mencari keadilan.⁵

Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari, meliputi:

1. Pendaftaran;
2. pemeriksaan kelengkapan;
3. penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
4. pemeriksaan pendahuluan;
5. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
6. pemeriksaan sidang dan perdamaian;
7. pembuktian;
8. putusan.

⁵ Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMMPress, hal. 47.

Gambar 1. Kerangka Pikiran



F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu *yuridis-empiris*, merupakan pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma berupa Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi tentang efektivitas gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Surakarta.⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu *deskriptif*, yang merupakan penelitian dengan memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian

⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 15.

Gugatan Sederhana dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi tentang efektivitas gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Surakarta.⁷

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta.

4. Jenis Data

- a. Pengumpulan data diperoleh dari data sekunder dengan membaca dan memahami buku, literatur serta pengaturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi tentang efektivitas gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Surakarta.
- b. Bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah, peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, makalah, seminar, artikel, surat kabar maupun majalah yang terkait dengan efektivitas gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Surakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Bahan hukum primer

Wawancara dengan Panitera dan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hal. 51.

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Yurisprudensi
- 2) Jurnal.
- 3) Buku.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu *deskriptif-kualitatif* yakni, merupakan analisis yang bersifat menjelaskan peraturan yang ada yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi tentang efektivitas gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Surakarta.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Pengadilan

1. Pengertian Peradilan
2. Pengertian Pengadilan
3. Pengertian Hakim
4. Asas Peradilan

B. Tinjauan Tentang Gugatan Sederhana

1. Pengertian Gugatan Sederhana
2. Asas Gugatan Sederhana
3. Ruang Lingkup Gugatan Sederhana

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kendala dalam pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Surakarta
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Surakarta dalam menerapkan efektivitas gugatan sederhana untuk para pihak

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA